

Dinamika Pengeluaran Pemerintah dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya (2018–2020)

Nur Sa'adatul Maulidya¹, Nabilah Azalia²

^{1,2} Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unesa

E-mail : 25040674315@mhs.unesa.ac.id, 25040674349@mhs.unesa.ac.id

Article History:

Received: 24 April 2026

Revised: 03 Mei 2026

Accepted: 07 Mei 2026

Keywords: *Pengeluaran
Pemerintah, Pertumbuhan
Ekonomi, PDRB, Keuangan
Publik*

Abstract: *Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal daerah yang berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi kunci dalam menentukan arah pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengeluaran pemerintah terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada periode 2018–2020. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja daerah Kota Surabaya mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan belanja sebesar 26,24% yang diikuti dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 6,08%. Namun pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19, belanja daerah mengalami penurunan sebesar 22,18% dan PDRB turun sebesar 4,85%. Temuan ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam perspektif keuangan publik, pengelolaan belanja yang efektif dan adaptif sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi kondisi krisis.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan naiknya Produk Domestik Bruto (PDB) atau total pendapatan suatu daerah dalam periode waktu tertentu, sedangkan perkembangan ekonomi mencakup perubahan struktural, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan dalam berbagai aspek sosial (Alfian & Yasin, 2023). Kedua indikator ini saling terkait dan menjadi penentu utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai perkembangan yang merata dapat memicu kesenjangan sosial yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial di tengah masyarakat.

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berusaha meningkatkan pertumbuhan

ekonominya melalui beragam kebijakan dan program pembangunan. Dalam kerangka otonomi daerah yang diatur sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mendapat kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Kondisi ini memerlukan kemampuan pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang terarah demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan harapan bagi setiap wilayah, tak terkecuali Kota Surabaya. Sebagaimana dikemukakan Todaro dan Smith (2011), pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Hal ini juga seiring dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Terealisasinya pertumbuhan ekonomi tak lepas dari tersedianya dana yang mendukung implementasinya. Dalam perspektif ekonomi makro, belanja pemerintah merupakan komponen vital dalam pengeluaran agregat yang memengaruhi permintaan keseluruhan dalam ekonomi. Sebagaimana dijelaskan Sukirno (2004), belanja pemerintah dapat mendorong pengeluaran agregat serta meningkatkan aktivitas ekonomi secara signifikan. Sumber penerimaan pemerintah utamanya berasal dari pajak yang dialokasikan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, baik untuk kebutuhan ekonomi jangka pendek maupun panjang. Pengeluaran pemerintah dapat berdampak langsung pada kegiatan ekonomi maupun dampak tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengeluaran pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengelola keuangan daerah secara mandiri dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel. Pengeluaran pemerintah daerah mencakup berbagai jenis belanja, meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga yang masing-masing memberikan dampak ekonomi berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolis terbesar di Indonesia yang memiliki potensi ekonomi besar dan berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur, Surabaya memiliki posisi strategis dalam struktur ekonomi nasional maupun regional. Berbagai sektor ekonomi mulai dari perdagangan, jasa, industri manufaktur, hingga sektor pertanian menyumbangkan kontribusi penting terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa Surabaya memiliki dinamika ekonomi yang tinggi dan kompleks.

Pengelolaan belanja daerah secara optimal menjadi faktor kunci dalam menjaga keseimbangan fiskal jangka panjang. Pemerintah Kota Surabaya perlu memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini mengingat bahwa anggaran daerah yang terbatas harus dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana fungsi belanja pemerintah daerah dapat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji fungsi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dengan menggunakan data tahun

2018-2020. Pemilihan periode penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tahun 2018-2020 merupakan periode yang cukup penting untuk diteliti, mengingat pada tahun 2020 dunia dilanda pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Kota Surabaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai bagaimana belanja pemerintah berperan dalam mendukung atau memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam kondisi normal maupun kondisi krisis.

Rumusan Masalah

- Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:
- Bagaimana realisasi dan struktur belanja pemerintah Kota Surabaya pada periode 2018-2020, meliputi perbandingan antar jenis belanja baik belanja operasi, belanja modal, maupun belanja tidak terduga?
- Bagaimana laju pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya pada periode 2018-2020, termasuk pertumbuhan sektor-sektor ekonomi utama penyusun PDRB?
- Bagaimana pengaruh atau dampak fungsi belanja pemerintah terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, baik secara langsung maupun tidak langsung
- melalui peningkatan investasi, peningkatan daya beli masyarakat, dan pembangunan infrastruktur?
- Bagaimana respons pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terhadap kebijakan pengeluaran pemerintah, terutama pada saat pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Untuk mendeskripsikan dan menganalisis realisasi serta struktur belanja pemerintah Kota Surabaya pada periode 2018-2020, meliputi realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja, perbandingan realisasi dengan target anggaran, serta tren belanja dari tahun ke tahun.
- Untuk mendeskripsikan dan menganalisis laju pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya pada periode 2018-2020, termasuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki kontribusi terbesar dan pertumbuhan tertinggi.
- Untuk menganalisis pengaruh atau dampak fungsi belanja pemerintah terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, dengan melihat mekanisme transmisi kebijakan fiskal melalui komponen-komponen belanja pemerintah.
- Untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengeluaran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
- Untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengeluaran pemerintah demi tercapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan didukung oleh analisis kuantitatif sederhana. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu fenomena atau keadaan secara sistematis

dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini didasarkan pada data primer yang diperoleh melalui studi literatur, jurnal ilmiah, buku-buku referensi, serta berbagai sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Data eksternal yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, khususnya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Selain itu, data juga diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya yang mencakup realisasi anggaran belanja pemerintah. Data sekunder meliputi:

- Data PDRB Kota Surabaya tahun 2018-2020 berdasarkan sektor ekonomi
- Data realisasi belanja pemerintah Kota Surabaya tahun 2018-2020
- Data penerimaan pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya
- Data indikator ekonomi makro lainnya yang relevan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengorganisir data yang berasal dari berbagai sumber tertulis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan mensintesis data yang telah terkumpul untuk kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap reduksi data yaitu pemilihan data yang relevan dengan penelitian, kemudian penyajian data dalam bentuk tabel atau narasi, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis komparatif untuk membandingkan data antar tahun periode penelitian sehingga dapat diketahui tren dan perubahan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal tersebut, dapat dipahami bahwa kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Gaya kepemimpinan ini tercermin dari kemampuan pemimpin dalam memberikan motivasi, inspirasi, serta perhatian individual kepada pegawai. Pemimpin yang mampu menciptakan komunikasi yang baik dan suasana kerja yang kondusif akan mendorong pegawai untuk bekerja lebih optimal. Hal ini disebabkan karena pegawai merasa dihargai dan didukung, sehingga meningkatkan semangat serta tanggung jawab dalam bekerja.

Selain berpengaruh secara langsung, kepemimpinan transformasional juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kinerja pegawai melalui Organizational Citizenship Behavior (OCB). Dalam penelitian dijelaskan bahwa OCB merupakan perilaku sukarela yang dilakukan pegawai di luar tugas formal, seperti membantu rekan kerja, menjaga hubungan kerja yang harmonis, serta berkontribusi terhadap lingkungan kerja yang positif. Perilaku ini muncul karena adanya rasa keterikatan pegawai terhadap organisasi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap OCB. Pemimpin yang mampu memberikan perhatian dan motivasi akan membangun kepercayaan pegawai, sehingga mereka terdorong untuk memberikan kontribusi lebih dalam pekerjaan. Pegawai tidak hanya bekerja sesuai tugasnya, tetapi juga menunjukkan inisiatif dan kepedulian terhadap organisasi.

Di sisi lain, OCB terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Pegawai dengan tingkat OCB yang tinggi cenderung lebih proaktif, mampu bekerja sama dalam tim, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Hal ini berdampak pada peningkatan efektivitas kerja, baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian, OCB berperan sebagai faktor yang

memperkuat hubungan antara kepemimpinan transformasional dan kinerja pegawai. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dan OCB merupakan dua faktor yang saling berkaitan dalam meningkatkan kinerja pegawai. Penerapan gaya kepemimpinan yang tepat akan mendorong munculnya perilaku positif pegawai, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2018–2020, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah memiliki hubungan yang searah dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari peningkatan anggaran belanja daerah pada tahun 2019 yang diikuti dengan kenaikan PDRB sebesar 6,08%. Sebaliknya, pada tahun 2020 terjadi penurunan anggaran belanja sebesar 22,18% yang berdampak pada penurunan PDRB sebesar 4,85% akibat pandemi Covid-19. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi, baik melalui belanja langsung maupun tidak langsung. Namun, stabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat mengelola pengeluaran daerah secara lebih efektif dan efisien, khususnya dalam mengalokasikan belanja pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur dan pelayanan publik.
2. Perlu adanya strategi pengelolaan anggaran yang adaptif terhadap kondisi krisis, seperti pandemi, agar dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diminimalisir.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode kuantitatif atau menambahkan variabel lain seperti investasi, inflasi, dan tenaga kerja agar hasil analisis lebih komprehensif.
4. Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmawati, Heni. (2022). Analisis Fungsi Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal STEI Ekonomi (JEMI)*, 31(2), 77–82.
- Surgawati, Iis. (2020). Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi: Hipotesis Keynes versus Teori Wagner. *Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 25–34.
- Badan Pusat Statistik. (2017–2022). PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah).
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Keuangan Daerah Kota Surabaya.